

Dampak Eksploitasi Coltan terhadap Eskalasi Perang Kongo Kedua (1997-2003)

Dian Yunita Ikasari

*Alumnus Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Airlangga
(E-mail: yippie_pimpim@yahoo.com)*

ABSTRACT

Since the mid-1990s there has been a growing body of research on the causes of wars. One of the most surprising and important findings is that natural resources, particularly lootable and valuable natural resource, play a key role in triggering, financing and prolonging these conflicts. Therefore, this article summarizes recent findings about the relation of natural resource abundance and war escalation in Democratic Republic of Congo. Coltan which is abundant in Congo was the most strategic mineral in progression of technological era at the end of 1990s. Coltan abundance became an attractive factor that increased the number of external actors involved in the Second Congo War. External actors exploited the Congo's condition that was full of ethnic conflicts and state weakness. They intervened in the Second Congo War through economic activities both legally and illegally. This condition, finally, made coltan a chain-link that sustains and funds the conflict of Congo. In short, natural resources abundance can be the cause of war escalation through external actors manipulation on internal conditions of the owning state.

Keywords: *natural resource abundance, war escalation, ethnic, external actors involvement, state weakness*

Sejak pertengahan 1990-an banyak bermunculan penelitian mengenai berbagai penyebab perang. Hal yang paling mengejutkan adalah adanya peran besar sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang *lootable* (sumber daya yang

mudah diekstraksi, diekplorasi, dan diperjualbelikan; bernilai tinggi dan berukuran kecil) dan bernilai strategis, dalam memicu, mendanai dan memperpanjang perang. Melimpahnya sumber daya alam tersebut justru dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi terciptanya suatu konflik (USIP 2007). Negara dengan sumber daya alam yang berlimpah justru akan mengalami korupsi, kemandekan ekonomi dan konflik kekerasan karena adanya persaingan di antara berbagai aktor untuk menguasai akses dan memperoleh keuntungan dari berlimpahnya sumber daya itu. Ketersediaan sumber daya alam yang *lootable* juga dapat memperkuat persaingan dalam menguasai sumber daya alam tersebut sehingga dapat memperbesar konflik.

Sumber daya alam, terutama mineral-mineral yang bernilai strategis, dapat menimbulkan konflik berkepanjangan ketika penguasaan, eksploitasi, perdagangan, serta perlindungannya memberikan kontribusi terhadap dan/atau memberikan keuntungan bagi konflik bersenjata. Hal ini terjadi karena mineral-mineral yang bernilai strategis tersebut dapat menghasilkan kekayaan dan kekuasaan bagi siapapun yang berhasil memilikinya atau mempunyai kemampuan baik secara legal maupun ilegal untuk mengeksploitasinya. Sumber daya alam dan pendapatan yang dihasilkan olehnya dapat digunakan oleh kelompok tertentu sebagai sarana sekaligus motif untuk saling bertikai sehingga dapat memunculkan dan memperpanjang terjadinya konflik. Keberadaan sumber daya alam dapat dijadikan mata rantai oleh kelompok-kelompok bersenjata yang bertikai untuk memperpanjang konflik atau untuk meraih keuntungan tertentu dari situasi konflik. Konflik akan menjadi semakin kompleks ketika semakin banyak aktor yang mempergunakan atau memanfaatkan sumber daya tersebut sehingga aktor-aktor itu bukan hanya ingin memperpanjang peperangan, tetapi juga ingin memperkaya diri melalui konflik yang ada.

Demikian pula yang terjadi di Republik Demokratik Kongo yang kaya sumber daya alam berharga, salah satunya adalah tantalum (bijih logam yang menjadi komponen penting dari berbagai peralatan elektronik) atau coltan (mineral penghasil tantalum). Kongo merupakan negara penghasil coltan terbesar di dunia dengan 80 persen cadangan coltan dunia terdapat di Afrika dan 80 persen di antaranya terletak di Kongo (NiZA & IPIS 2006). Kemajuan teknologi pada era 1990-an mendorong peningkatan kebutuhan tantalum. Peningkatan kebutuhan tantalum membuat harga coltan membumbung tinggi yaitu 65 USD per kilogram pada Januari 2000 dan meningkat drastis menjadi 550 USD pada Desember 2000 sehingga membuat coltan menjadi komoditas logam yang paling dicari dan bahkan mendapat sebutan *black gold* (IPIS 2002). Sepanjang tahun 2000, tuntutan terhadap persediaan coltan meningkat hingga 300 persen (Montague 2002). Namun, pada 2001, harga coltan justru menurun drastis hingga 37 USD (Todd 2008). Peristiwa ini kemudian dikenal dunia dengan sebutan *coltan-bust* (Lalji 2007).

Sebagai penghasil coltan terbesar dunia, Kongo adalah negara dengan sumber daya alam terkaya dunia sehingga kerap disebut *a geological scandal* (NiZA & IPIS 2006). Namun, mayoritas rakyat Kongo justru tidak ikut mengambil keuntungan dari kekayaan sumber daya alamnya, termasuk coltan. Sebaliknya, warga sipil justru menjadi korban kekerasan dan menjadi target perampokan, penjarahan dan perampasan. Rakyat Kongo yang hidup miskin dan menganggur direkrut untuk menjadi tentara maupun dipaksa bekerja sebagai penambang coltan. Rakyat Kongo yang menjadi penambang coltan hanya memperoleh bayaran antara 5-10 USD. Hal ini membuat *gross domestic product* (GDP) per kapita negara ini menurun pada 2000 meskipun pada saat yang sama harga jual coltan melambung tinggi. Perang di Kongo telah merenggut empat juta jiwa rakyat Kongo, membuat 2,3 juta rakyat mengungsi dan 16 juta lainnya mengalami kelaparan (Exenberger & Hartmann 2007).

Perang ini merupakan Perang Kongo Kedua yang diawali dengan desakan Pemerintah Kongo di bawah pimpinan Laurent Kabila terhadap negara-negara aliansinya (Rwanda dan Uganda) yaitu untuk menarik mundur pasukannya dari kawasan Kongo dalam Perang Kongo Pertama (1996-1997) yang berhasil menjatuhkan Presiden Mobutu Sese Seko. Perang Kongo Kedua pecah pada 1998 dengan adanya invasi Rwanda, Uganda dan Burundi (Iyenda 2005). Di sisi yang berlawanan, Pemerintahan Presiden Kabila mendapatkan dukungan dari Angola, Namibia, dan Zimbabwe. Perang ini mengalami eskalasi seiring dengan meningkatnya harga coltan di pasar internasional. Eskalasi ini ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkat konflik yang melibatkan pertambahan jumlah pihak yang bertikai, perluasan isu, dan adanya peningkatan sifat konflik. Pertambahan jumlah pihak yang bertikai dapat dilihat melalui keterlibatan atau intervensi dari beberapa aktor eksternal yaitu negara-negara tetangga Kongo (Rwanda, Uganda, Burundi, Angola, Namibia, dan Zimbabwe) dan perusahaan-perusahaan multinasional. Sedangkan, perluasan isu terlihat dengan adanya perubahan-perubahan tujuan dari konflik yang terjadi, yaitu diawali adanya konflik etnis antara suku Hutu dan suku Tutsi kemudian meluas menjadi konflik yang bermotif ekonomi dengan adanya upaya eksploitasi sumber daya alam Kongo hingga melibatkan pihak eksternal.

Peningkatan sifat konflik dapat diketahui melalui meningkatnya kekerasan yang terjadi, seperti adanya perampasan, kerja paksa, penculikan, pertempuran bersenjata, dan keterlibatan militer. Selain itu, peningkatan sifat konflik juga ditunjukkan dari peserta konflik itu sendiri, yang semula hanya melibatkan pertikaian etnis antara Hutu dan Tutsi, tetapi kemudian berkembang menjadi perang antarnegara, yaitu Rwanda, Uganda dan Burundi melawan Kongo yang beraliansi dengan Angola, Namibia, dan Zimbabwe.

Selain itu, ditemukan pula berbagai bukti adanya pemanfaatan eksploitasi dan perdagangan coltan Kongo sebagai sumber dana perang oleh Rwanda dan Uganda sebagai pemain utama dalam perang ini. Menurut laporan PBB, beberapa perusahaan internasional seperti Banro-Resources Corporation, Geologistics Hannover, Rwasibo-Butera, Eagles Wings, Veen, Sogem, Afrimex, Cogecom, Ventro Star, Raremet, Finiming Ltd., Union Transport, Specialty Metal, dan Finconcorde telah mengimpor coltan dari Rwanda untuk digunakan di Eropa, Asia dan Amerika Serikat (Montague 2002).

Aktor-Aktor Utama dalam Perang Kongo Kedua

Konflik etnis merupakan salah satu motif awal yang ditunjukkan oleh Rwanda dan Uganda atas keterlibatannya di Kongo. Keterlibatan kedua negara itu dalam Konflik Kongo bermula dari meningkatnya laju pengungsi Hutu ke wilayah Kongo. Pengungsi Hutu yang didominasi Milisi Interahamwe, yaitu ekstremis Hutu pelaku genosida terhadap Tutsi di Rwanda, dan mantan tentara pemerintah Hutu Rwanda, Forces Armées Rwandaises (FAR), mendapat perlindungan dari Pemerintahan Mobutu di kawasan Kongo. Mobutu bahkan membiarkan Hutu Rwanda untuk menggunakan tempat pengungsian di Kivu sebagai tempat membangun basis kekuatan gerakan pemberontakan, tempat melakukan latihan militer dan mengorganisir kembali pembantaian terhadap penduduk dan warga negara beretnis Tutsi di Kongo (Gross 2007).

Tindakan Mobutu ini menyinggung para pemimpin Tutsi di sejumlah negara tetangga Kongo terutama Rwanda dan Uganda. Para pemimpin Tutsi khawatir jika Hutu kembali menaklukkan Rwanda dan melakukan genosida kepada Tutsi. Hal ini membuat Rwanda dan Uganda memiliki alasan yang kuat untuk menginvasi Kongo yang dianggap mengancam keamanan negaranya. Karena itu, Rwanda dan Uganda mulai memasuki Kongo melalui dukungan keduanya terhadap gerakan pemberontakan di Kongo, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL).

Invasi ini berdampak sangat buruk. Para pengungsi Hutu Rwanda bekerjasama dengan Hutu Kongo mulai melakukan pembersihan etnis Tutsi Kongo di Kivu, terutama di Masisi (Kivu Utara) dan Banyamulenge (Kivu Selatan) (Gross 2007). Sebaliknya, ketika Rwanda dan Uganda menginvasi Kongo, keduanya berbalik melakukan pembersihan etnis terhadap Hutu, baik Hutu Rwanda maupun Hutu Kongo. Bahkan penduduk yang tinggal di desa-desa yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Interahamwe dan eks-FAR juga turut dibantai. Dalam perkembangannya, konflik juga turut melibatkan sejumlah kelompok pribumi lain di Kongo yaitu Hema dan Lendu serta kelompok milisi yang terdiri dari pemuda pribumi Kongo, Mai Mai.

Perang Kongo Kedua dimulai pada 1998 ketika Rwanda beserta sekutunya gagal menjadikan Kabila, mantan pemimpin AFDL, sebagai presiden boneka bagi Rwanda dan Uganda di Kongo. Ketika terjadi keretakan hubungan antara aliansi Rwanda dengan Kabila, Rwanda dan Uganda menyokong sebuah gerakan pemberontakan yang diciptakannya untuk melawan Kabila, Rally for Congolese Democracy (RCD). Anggota RCD merupakan mantan pendukung Kabila yang kecewa dengan pemerintahannya, mantan pendukung Mobutu dan orang-orang minoritas yang berbahasa Rwanda (Banyamulenge dan Banyarwanda) yang mengalami diskriminasi saat Kabila dan Mobutu berkuasa (Raeymaekers t.t.). Karena itu, untuk mengatasi keterlibatan Rwanda dan Uganda di wilayah negaranya, Kabila kemudian meminta bantuan dari Southern African Development Community (SADC). Beberapa negara yaitu Namibia, Angola, dan Zimbabwe mulai mengirim pasukannya untuk membantu Pemerintahan Kabila (Gross 2007). Perang Kongo Kedua mulai dijadikan lahan bagi sejumlah individu untuk berebut kekuasaan. Perang Kongo Kedua juga menjadi perang penjarahan dengan menjadikan kekayaan sumber daya alam di Kongo sebagai komoditas yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bertikai.

Pecahnya Perang Kongo Kedua yang mengarah pada penjarahan dan pencurian sumber daya alam Kongo sehingga menimbulkan perang besar yang berlarut-larut tidak lepas dari kelemahan Pemerintahan Kabila sebagai rezim baru di Kongo. Sejak awal 1999, Kabila memegang seluruh kekuasaan atas eksekutif, legislatif sekaligus kekuasaan militer ketika dia mencopot jabatan sisa-sisa anggota AFDL dalam tubuh pemerintahan.

Keadaan ini membuat iklim pembangunan rezim menjadi tidak kondusif. Karena itu, Kabila membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya sekaligus dikontrol untuk menjalankan segala urusan negara. Keadaan ini menjelaskan banyaknya anggota keluarga Kabila dalam tubuh aparat keamanan, peran tokoh-tokoh yang tidak dikenal dalam struktur pemerintahan dan tidak adanya aliansi-aliansi dengan para pemimpin regional dan pemimpin etnis.

Meskipun setelah berkuasa Kabila hanya memiliki sedikit pendukung internal, tetapi dia memiliki banyak aliansi asing. Hal ini karena Kabila hanya memiliki satu tujuan strategis, yaitu tetap berkuasa. Kabila lebih memilih membagi-bagikan beberapa bagian negaranya sebagai balasan atas dukungan terhadap pemerintahannya. Kabila tetap dapat berkuasa karena kuatnya posisi tawar Kabila dengan pihak asing yang menjadi pendukungnya (ICG 2000). Karena itu, Kabila sangat bergantung pada sokongan pendukung asing. Kegagalan Pemerintahan Kabila ini kemudian berdampak pada banyaknya angkatan bersenjata asing dan munculnya berbagai gerakan separatis, baik yang merupakan bentukan dari militer negara lain maupun karena keinginan kolektif, di Kongo.

Berbagai motif diungkapkan oleh berbagai negara yang terlibat perang besar di Kongo ini. Karena itu, keterlibatan keenam negara dalam perang di Kongo tidak terjadi secara bersamaan (lihat Gambar 1). Motif mereka beragam, mulai dari persoalan ancaman keamanan wilayah, upaya perlindungan diri, hingga alasan-alasan etnisitas. Motif-motif ini kemudian dijadikan pembenaran atas intervensi mereka dalam Perang Kongo Kedua. Bagi Rwanda dan Uganda, yang menjadi pemain utama dalam perang Kongo ini, keberadaan mereka di Kongo tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan mereka dari Perang Kongo Pertama. Perlindungan terhadap Tutsi dan ancaman terhadap kedaulatan negara mereka masing-masing menjadi justifikasi utama intervensi keduanya dalam konflik Kongo. Namun, motif-motif ini menjadi semakin kabur ketika Rwanda dan Uganda secara aktif melakukan penjarahan dan perdagangan ilegal terhadap sumber daya alam Kongo.

Gambar 1
Keterlibatan Negara-Negara Asing dalam Perang Kongo Kedua



Sumber: Gross, Deanna, 2007. *Politics and Plunder: Civil War and Regional Intervention in Africa*. [online]. dalam search.arrow.edu.au/main/results?subject=democratic+republic+of+congo [diakses 22 Maret 2009].

Rwanda menginvasi Provinsi Kivu Utara dan Selatan yang diduga merupakan basis milisi Hutu. Tetapi, pada kenyataannya Rwanda juga menginvasi Katanga, Kasai dan Orientale, padahal dalam ketiga kawasan tersebut tidak ditemukan bukti adanya aktivitas pemberontakan Hutu. Pasukan RPA juga menyerang desa-desa yang dicurigai sebagai markas milisi Hutu dan merampas benda apapun yang dianggap berharga. Sedangkan, menurut laporan dari penyelidikan PBB, Rwanda kemudian tidak lagi berupaya untuk menangkap milisi Interahamwe dan eks-FAR sebagaimana diungkapkan oleh salah satu anggota Interahamwe dalam wawancara melalui PBB:

We haven't fought much with the RPA in the last two years. We think they are tired of this war, like we are. In any case, they aren't here in the Congo to chase us, like they pretend. I have seen the gold and coltan mining they do here, we see how they rob the population. These are the reasons for their being here. The RPA come and shoot in the air and raid the villagers' houses but they don't attack us anymore. If you are lucky, and you have a big brother in the RPA, he might be able to get you some food and ammunition (UN Panel Report 2002).

Keberadaan Rwanda tidak lebih hanya untuk mengeksploitasi kekayaan alam Kongo. Rwanda dan beberapa individu dalam pemerintahan dan militernya mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari peran mereka dalam Perang Kongo, terutama melalui perdagangan dan eksploitasi coltan.

Motif ekonomi keterlibatan Uganda juga tidak jauh beda dengan Rwanda. Ketika pasukan UPDF tiba di Kongo, aktivitas pertama yang mereka lakukan adalah membuat kesepakatan bisnis dengan pemberontak lokal (Iyenda 2005). Beberapa perusahaan komersial bahkan dibangun petinggi-petinggi Uganda beserta anggota-anggota UPDF. Laporan kedua PBB kembali mengungkapkan adanya eksploitasi sumber daya alam Kongo oleh pihak-pihak dari Uganda dengan terus mengobarkan konflik melalui pertikaian antaretnis di Kongo. Besarnya motif-motif ekonomi dibanding motif-motif politik atau keamanan juga ditunjukkan oleh aliansi pro-Kabila, yaitu Namibia, Zimbabwe dan Angola.

Ketujuh negara yang berperang dalam Konflik Kongo ini saling kait mengait dan menciptakan jaringan yang menjarah dan mengeksploitasi sumber daya alam Kongo. Aliansi Rwanda tetap melanjutkan keterlibatannya dalam Perang Kongo untuk melakukan penjarahan terhadap sumber daya alam Kongo sebagai cara memperkaya diri dan mendanai aktivitas-aktivitas militer dan politiknya.

Sebaliknya, aliansi Kabila memberikan bantuan militer melalui pertukaran dengan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan dan konsesi-konsesi pertambangan atas sumber daya alam Kongo. Jaringan yang dibangun kedua kubu sama-sama memperoleh keuntungan finansial melalui berbagai aktivitas kriminal termasuk penjarahan, penggelapan dan penyelewengan kekayaan publik, penyelundupan, penghapusan pajak, penyuapan dan korupsi. Negara-negara tersebut mengungkapkan justifikasinya atas penempatan angkatan bersenjata mereka di Kongo dengan mengusung isu-isu etnisitas dan ancaman kedaulatan negara sehingga mereka dengan mudah dapat membentuk jaringan bisnis di kedaulatan Kongo.

Melalui siklus yang tercipta dari aktivitas jaringan ini terbentuk eksploitasi yang sistematis terhadap sumber daya alam Kongo. Coltan merupakan salah satu sumber daya alam Kongo yang berperan sangat penting dan paling bernilai selama Perang Kongo Kedua berlangsung karena peningkatan jumlah aktor yang terlibat dalam perang ini berjalan seiring dengan melonjaknya harga coltan di pasar dunia. Coltan merupakan komoditas terpenting yang dikuasai Rwanda, sebagai pemain utama dalam Perang Kongo Kedua, menjadikan coltan sebagai salah satu ujung mata rantai penting keberlangsungan dan eskalasi konflik di Kongo.

Eksplotasi dan Perdagangan Coltan

Coltan merupakan sumber daya alam yang banyak dihasilkan di sebelah timur Kongo, terutama di Provinsi Kivu (Hayes & Burge 2003). Area penghasil coltan disebut dengan *coltan belt*, yang terbentang dari Bunia, Goma, Bukavu, Lugushwa, Kalima, Masisi dan Kindu yang merupakan daerah di kawasan Kivu dan Ituri (Todd 2008). Ironisnya, Provinsi Kivu berada di bawah kontrol RCD-G yang disokong penuh oleh Rwanda. Tingginya permintaan dunia atas persediaan coltan pada 2000 membuat para penambang bahan tambang lain beralih menjadi penambang coltan serta membuat para petani meninggalkan lahan pertaniannya untuk menjadi penambang coltan.

Ketika harga coltan melonjak tinggi di tahun 2000, RCD-G bahkan membentuk perusahaan baru, SOMIGL, untuk memonopoli seluruh hasil ekspor coltan. SOMIGL dibentuk dengan tujuan untuk mengatur perdagangan dan memaksimalkan keuntungan. Monopoli digunakan untuk mendanai usaha-usaha perang RCD-G (IPIS 2002). SOMIGL juga disokong penuh oleh empat perusahaan asing yaitu Africom, Premeco, Cogecom dan Cogear. Pada April 2001, monopoli perdagangan SOMIGL dicabut bersamaan dengan dipublikasikannya hasil laporan Panel Ahli PBB yang menolak perdagangan ilegal di Kongo. Setelah monopoli dicabut, RCD-G kemudian memperdagangkan coltan dengan jalan menyelundupkannya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi rendahnya harga yang

diterima SOMIGL dan menghindari kewajiban membayar pajak (Jamboweb 2001).

Dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh SOMIGL, RPA memegang kunci penting sebagai *shareholder* utama SOMIGL. RPA juga membentuk badan *ad hoc* untuk mengatur penambangan sumber daya alam Kongo dan memfasilitasi hubungan dengan pebisnis Barat (UN Panel Report 2002). Hasil penemuan PBB juga menunjukkan adanya kerjasama *joint venture* antara pedagang coltan Eropa dengan anggota-anggota RPA dan kroni-kroni Paul Kagame. Bahkan perjalanan ekspor coltan dari Kongo harus selalu melalui Kigali, ibukota Rwanda. Angkatan bersenjata Rwanda mampu memperoleh penghasilan dari perdagangan coltan sebanyak 250 juta USD dalam waktu 18 bulan (Delawala 2001).

Coltan merupakan komoditas penting dalam mata rantai Perang Kongo Kedua yang tidak banyak diketahui. Perdagangan coltan mampu menjelaskan alasan pihak-pihak yang bertikai di Kongo enggan untuk meninggalkan Kongo. Dari hasil eksploitasi sumber daya alam di Kongo oleh Rwanda dan Uganda, coltan menunjukkan nilai tertinggi dibanding sumber daya alam lain. Perdagangan coltan mendorong terciptanya jaringan elit di antara para petinggi negara-negara penginvasi Kongo. Jaringan elit yang terdiri dari elit militer, politik, dan bisnis ini dibentuk untuk mempermudah pengontrolan dan perdagangan coltan ilegal. Jaringan elit ini juga menopang aktivitas perekonomian mereka melalui jaringan dan pelayanan dari kelompok kriminal transnasional seperti transportasi udara, transaksi dan kesepakatan perdagangan senjata ilegal yang menggunakan pendanaan dari perdagangan coltan (UN Panel Report 2001).

Rwanda melalui RPA melakukan penjarahan secara sistematis dengan membangun kelompok bersenjata yang menjadi aliansinya. Hal serupa juga dilakukan oleh Uganda melalui UPDF dengan RCD-ML dan MLC. Uganda menjalankan bisnis coltan Kongo melalui perusahaan Trinity Investment, yang dipimpin Jenderal Kazini pimpinan UPDF, dan LA CONMET, sebuah perusahaan Rusia yang perwakilannya di pegang oleh Jenderal Salim Saleh (sepupu Museveni). Uganda juga melibatkan politikus dan pebisnis dari suku Hema ke dalam jaringan elitnya untuk melaksanakan aktivitas perdagangannya di bawah perlindungan UPDF (UN Panel Report 2002).

RPA mampu mengorganisasikan kekuatannya di dalam negeri Kongo melalui RCD-G untuk melakukan monopoli terhadap perdagangan dan ekspor coltan serta melakukan *fixing* harga sehingga dapat memperoleh pendanaan bagi aktivitas militernya dan memperkaya pejabat-pejabat RPA. Bahkan kelompok anti Rwanda seperti *Mai Mai* juga menjual coltan kepada Rwanda Metals dan Grands Lacs Metals, perusahaan perdagangan mineral milik RPA.

RCD-G juga dimanfaatkan sebagai otoritas yang berfungsi untuk mengumpulkan pendapatan publik untuk diselewengkan dan disimpan sebagai penghasilan RCD-G bahkan bagi Rwanda. RCD-G juga menjadi kelompok bersenjata yang memperoleh penghasilan dari pemberian perlindungan atas konsesi pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pihak asing. Karena itu, eksploitasi ilegal atas coltan memungkinkan RCD-ML, MLC dan terutama RCD-G atau kekuatan invasif dari pemerintahan negara lain untuk membangun kekuatan tempur, membeli kesetiaan (baik massa maupun perwira) dan membeli perlengkapan perang dari luar negeri untuk melanjutkan perang.

Keadaan menjadi lebih menguntungkan karena area *coltan belt* berada di kawasan perbatasan Rwanda-Kongo maupun Uganda-Kongo. Kivu bahkan dijadikan sebagai tempat penampungan pengungsi Hutu sehingga mempermudah Rwanda dan Uganda melakukan invasi dengan menggunakan justifikasi ancaman keamanan sebagai upaya melakukan eksploitasi coltan. Kedekatan wilayah juga mempermudah terjalannya kolaborasi dan aliansi ekonomi lintas batas untuk melakukan eksploitasi. Keberlimpahan coltan akhirnya menjadi sumber pendanaan utama bagi aktivitas militer Rwanda dan RCD-G untuk melanjutkan perang di Kongo. Anggaran militer Rwanda bahkan mencapai 20 juta USD per bulan dari perdagangan coltan (Clark dan Koyame 2002, 2006). Sebagai akibatnya, pengontrolan terhadap coltan menjadi kunci strategis dalam perang. Dengan demikian konflik di wilayah-wilayah kaya sumber-sumber alam memiliki tingkat eskalasi yang sangat cepat (Aust 2005, 172). Konflik juga makin berkembang karena kepentingan-kepentingan penumpukan kekayaan pribadi para elit militer dan pelaku perekonomian perang.

Eksplorasi sistematis yang dilakukan Rwanda dan Uganda beserta RCD-G, RCD-ML serta MLC dan tingginya permintaan dunia terhadap coltan membuat banyak pihak diluar Kongo mendapat keuntungan secara ekonomi dan berkeinginan untuk melanjutkan perang. Peran perusahaan-perusahaan multinasional menjadi sangat signifikan sebagai akses perdagangan coltan menuju pasar internasional. Perusahaan-perusahaan multinasional ini juga terikat kesepakatan yang saling menguntungkan dengan gerakan pemberontak yang menguasai area pertambangan coltan dan bukan dengan pemerintah Kongo. Maka, perusahaan-perusahaan ini menjadi aktor nonnegara yang terlibat perdagangan coltan ilegal hingga ke pasar internasional, turut menopang usaha-usaha perang pihak-pihak yang bertikai di Kongo dan secara tidak langsung terlibat dalam keberlangsungan Perang Kongo Kedua.

Pertikaian Etnis, Kegagalan Negara, dan Pencurian Coltan di Kongo

Dalam Perang Kongo Kedua ditemukan adanya jaringan yang tercipta antara aktor-aktor negara dan nonnegara. Pertikaian etnis yang menjadi motif awal intervensi negara asing (aliansi anti-Kabila) membuat Perang Kongo Kedua cepat meluas. Motif ini terus didengung-dengungkan meskipun sebenarnya sudah tidak lagi menjadi tujuan utama dari pihak-pihak yang bertikai.

Kongo yang terdiri dari ratusan etnis membawa Kongo sebagai negara yang diwarnai oleh berbagai macam kepentingan dan benturan antar etnis. Ketika negara dianggap tidak mampu mengakomodasi kepentingan sejumlah etnis maka akan menimbulkan ketidakpuasan yang mudah menyulut konflik. Apalagi di kawasan Great Lakes, tumpang tindih pembagian geografis menyebabkan kelompok etnis yang memiliki kesamaan etnis terpisah di dua wilayah yang berbeda. Keadaan ini dapat mendorong perluasan konflik berdasarkan ikatan kesamaan identitas etnis. Sebagaimana yang terjadi dalam konflik antara Hutu dan Tutsi, Kesamaan etnis dan solidaritas di dalamnya mendorong etnis dari dua wilayah yang berbeda saling bekerja sama dan menciptakan musuh bersama. Ketika Hutu Rwanda melarikan diri ke Kongo, mereka segera membentuk kekuatan baru dengan bantuan Hutu Kongo. Hal serupa juga dilakukan suku Tutsi. Maka konflik meluas dengan cepat meskipun kemudian upaya perlindungan etnis bukan menjadi tujuan utama konflik.

Intervensi angkatan bersenjata asing menjadi semakin mudah dengan adanya ketidakstabilan pemerintah karena lemahnya rezim yang berkuasa. Rasa tidak percaya dapat dengan mudah dibangun menjadi rasa ketidakpuasan dan kemudian keinginan untuk menentang dan memberontak. Rezim Kabila yang juga kental dengan etnisitas dan nepotisme membuat rezim yang berkuasa menjadi rentan dan rapuh oleh adanya upaya-upaya kudeta dan penggulingan.

Ketergantungan Rezim Kabila terhadap pihak asing juga menjadi kelemahan fatal dalam pemerintahan Kongo. Demi mempertahankan kekuasaannya, Kabila mempertukarkan kekayaan negaranya dan bahkan beberapa kawasan negaranya untuk dieksploitasi oleh pihak asing. Zimbabwe, Namibia dan Angola adalah negara-negara pendukung rezim Kabila yang turut menikmati hasil kekayaan alam Kongo. Pada akhirnya, ketidakpuasan rakyat Kongo dimanfaatkan dan kemudian dimobilisasi oleh aktor-aktor asing untuk menentang pemerintah yang berkuasa.

Institusi pemerintahan yang lemah mendorong pihak penentang rezim yang berkuasa beserta negara lain yang menjadi penopangnya dapat membangun jaringan-jaringan informal yang mengikis kendali institusi-institusi negara. Struktur negara yang lemah juga akan menimbulkan ketidakamanan bagi kelompok-kelompok etnis di dalam negara. Ketidakamanan ini muncul karena kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, faksi-faksi yang bertikai serta angkatan bersenjata negara lain yang beroperasi di Kongo.

Selama peperangan berlangsung, lingkaran kekerasan sengaja dibangun dan dilestarikan untuk menimbulkan rasa takut, permusuhan dan saling curiga sehingga situasi menjadi tidak stabil dan mudah dikontrol. Ketidakamanan ini dapat mendorong kelompok etnis yang ada untuk saling berkompetisi dalam mengontrol negara demi mempertahankan kelangsungan hidup etnisnya. Maka dengan demikian menjadi lebih mudah untuk menarik keterlibatan kelompok etnis diluar negara untuk terlibat dalam konflik ketika kelompok etnis tersebut merasa dapat memperoleh keuntungan dari situasi konflik yang ada. Pertikaian etnis dapat memancing keterlibatan kepentingan asing untuk memperoleh keuntungan dari akses terhadap sumber daya alam maupun melalui perdagangan senjata.

Negara yang lemah juga melemahkan kendali negara atas pengontrolan pasar dan keamanan sehingga mendorong penyebaran perdagangan ilegal dan penjarahan (Goerzig 2005). Konflik menjadi semakin berkembang ketika di area konflik terdapat sumber daya alam yang menguntungkan dan dapat dengan mudah diperdagangkan secara ilegal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ross (2002 dalam Humphreys 2003) bahwa ketika aset-aset legal dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun pemberontak maka aset-aset ilegal akan lebih memberikan keuntungan bagi pemberontak daripada bagi pemerintah. Dalam situasi ini, permusuhan antaretnis dapat membawa keuntungan ekonomi bagi kelompok lain, baik aktor negara, perusahaan multinasional maupun militer dan kelompok pemberontak melalui aktivitas ekonomi ilegal.

Coltan merupakan salah satu dari beberapa sumber daya lain yang ditambang dan dijual secara ilegal ke pasar internasional untuk menghasilkan keuntungan bagi negara penginvasi Kongo dan sejumlah gerakan pemberontak maupun milisi bersenjata yang berkembang di Kongo. Perdagangan berlian, kayu, tembaga, emas dan kobalt juga membantu membiayai usaha perang gerakan pemberontakan maupun angkatan bersenjata lain yang menginvasi Kongo. Namun, coltan merupakan sumber daya paling menguntungkan daripada sumber daya lainnya dan paling menarik bagi aktor asing untuk melakukan operasi perdagangan di Kongo (Montague 2002).

Peran coltan lebih signifikan karena tidak adanya pengaturan terhadap perdagangan coltan sehingga jaringan perdagangan coltan menjadi rumit dan samar (Essick 2001). Perdagangan coltan memiliki sertifikasi yang lemah sehingga sulit diketahui keaslian tempat asal penambangan coltan. Dengan demikian, penggelapan coltan Kongo menjadi fenomena yang tidak diperhatikan dan mudah dilakukan (Montague 2002). Terlebih ketika permintaan dan harga coltan melonjak tinggi di akhir tahun 1990-an membuat coltan menjadi sumber daya paling dicari dan paling strategis. Coltan Kongo yang area penambangannya

dikuasai oleh RCD-G mampu memberikan penghasilan langsung bagi Rwanda dan Uganda dengan memperdagangkannya sebagai coltan Rwanda dan Uganda.

Eksplorasi dan penjarahan coltan yang dilakukan oleh Rwanda dan Uganda melalui angkatan bersenjataanya melahirkan keuntungan-keuntungan ekonomi yang membuat aliansi anti-Kabila ini enggan menyelesaikan perang. Keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh Rwanda dan Uganda dari perang akan mendorongnya untuk terus berperang karena akan besar kemungkinan untuk memperkaya diri melalui perang. Konflik terus berlanjut karena baik Rwanda maupun Uganda mendapat keuntungan melalui manipulasi keadaan serba kekurangan dan akhirnya berkepentingan untuk memperpanjang konflik. Perang yang terus berlangsung mendorong pemerintah yang berkuasa untuk menarik dukungan asing demi mempertahankan kekuasaannya. Maka jumlah peserta perang semakin bertambah.

Baik Rwanda maupun Uganda bahkan menciptakan perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dengan militer dan pemerintahannya untuk memfasilitasi ekstraksi terhadap coltan (Montague 2002). Keduanya juga secara langsung maupun tidak langsung mengangkat pemimpin pemberontak lokal dan komandan lapangan untuk menjalankan perdagangan gelap coltan dan berbagai sumber daya Kongo lainnya. Orang-orang yang diangkat Rwanda dan Uganda ini membangun hubungan dengan perusahaan-perusahaan Barat dan memfasilitasi transaksi antara perusahaan-perusahaan buatan Rwanda dan Uganda dengan perusahaan asing tanpa melewati izin dari pemerintah Kongo.

Jadi, Perang Kongo Kedua bukanlah sekadar perang sipil biasa yang dihasilkan oleh adanya konflik etnis. Pertikaian etnis jelas mewarnai keberlangsungan Perang Kongo Kedua, namun perang ini juga merupakan konflik yang melibatkan berbagai aktor baik negara maupun nonnegara. Sekalipun terlokalisasi, perang ini melibatkan hubungan transnasional. Kolaborasi antara para *warlord*, kelompok pemberontak, angkatan bersenjata asing dan pemerintahan yang lemah di satu sisi dan melonjaknya harga coltan di pasar dunia disisi lain, secara sistematis mendorong keberlangsungan dan perluasan kekerasan dan konflik dalam Perang Kongo Kedua.

Tingginya permintaan pasar dunia dan strategisnya nilai coltan serta penguasaan terhadap penambangan, produksi dan eksploitasinya oleh aktor asing dan gerakan pemberontak menjadikan coltan sebagai sumber daya penopang perang dan mampu menjadikannya sebagai sarana melakukan kekerasan. Coltan juga turut memperlemah kemampuan negara melalui mata rantai konflik yang diciptakannya.

Mata Rantai Konflik: Keterlibatan Pihak Asing, Keberlimpahan Coltan, dan Perang Kongo Kedua

Perang Kongo Kedua merupakan perang yang terjadi di tingkat lokal, tetapi melibatkan hubungan eksternal yang rumit. Perang yang melibatkan pertikaian antaretnis ini menjadi semakin meluas dengan adanya sumber daya alam yang bernilai strategis dalam jumlah yang sangat berlimpah di kawasan konflik. Keuntungan perang yang diperoleh pihak-pihak yang bertikai dari eksploitasi sumber daya alam ini tidak hanya menguntungkan pada masa perang tapi mereka juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan di saat damai. Para *belligerent* lebih memilih berperang karena mereka terlibat kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak akan mungkin dilakukan selama masa damai. Kondisi ini mendorong terciptanya hubungan khusus antara kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal dan konflik yang berkepanjangan (Humphreys 2003).

Kongo merupakan negara dengan wilayah geografis yang luas dan institusi negara yang labil dan rapuh membuat sejumlah kawasan perbatasan, yang justru kaya sumber daya alam, mendapat kontrol yang lemah dari negara. Kendali institusi negara yang lemah memudahkan pihak asing untuk melakukan intervensi karena lebih mudahnya akses menuju lokasi sumber daya alam. Kemudahan akses ini memudahkan Rwanda, Uganda dan Burundi membangun jaringan lintas batas dan membentuk aliansi dengan pihak lokal Kongo. Kontrol pemerintah yang lemah terhadap daerah perbatasan juga mempermudah suplai senjata dari para *warlord*. Karena itu, keberlimpahan sumber daya alam di daerah perbatasan juga memperlancarkan upaya-upaya mempertahankan perang karena pertukaran dana perang dengan senjata menjadi lebih mudah. Dengan demikian, perang menjadi lebih mudah didanai.

Ironisnya, Pemerintah Kongo tidak mampu mengatasi kelemahan kontrol ini sendirian sehingga semakin menambah jumlah aktor dalam konflik. Konflik pun mengalami eskalasi dengan lebih cepat. Bantuan dari Zimbabwe, Angola dan Namibia justru memperburuk keadaan, sebab Pemerintah Kongo memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan yang sebenarnya tidak cuma-cuma. Rezim Kabila yang lemah dan sangat mengandalkan dukungan eksternal dalam menghadapi kelompok-kelompok pemberontakan di dalam negeri Kongo membuat Kabila harus menyerahkan kekayaan alam Kongo sebagai pertukaran atas bantuan militer dari Zimbabwe, Angola dan Namibia. Mata rantai Perang Kongo Kedua menjadi sulit diputus karena setiap aktor yang terlibat berupaya untuk terus mengejar kepentingannya.

Coltan merupakan sumber mata rantai tersebut. Keberadaan Rwanda dan Uganda tidak lepas dari eksploitasi coltan yang sedang melonjak nilainya di pasar internasional. Keberadaan sumber daya alam yang berlimpah dapat meningkatkan

dorongan keterlibatan pihak luar dalam konflik sipil (Humphreys 2003). Saat Rwanda dan Uganda bersikeras untuk melanjutkan eksploitasinya di Kongo, Pemerintah Kongo tidak mau tinggal diam dan mengusung bantuan dari negara lain yang kemudian juga mengeksploitasi sumber daya alam Kongo yang lain. Coltan juga yang membuat RCD menjadi gerakan separatis paling berpengaruh dan kuat dalam melawan pemerintahan Kongo.

Didukung dengan melonjaknya harga dan kebutuhan coltan di pasar dunia menarik perusahaan-perusahaan multinasional untuk terlibat bisnis perdagangan coltan di Kongo yang dijalankan secara ilegal. Beroperasinya perusahaan asing di negara yang sedang berkonflik juga turut menambah aktor yang terlibat dalam siklus konflik meskipun tidak secara langsung dan turut memperburuk situasi konflik. Sebab, penetrasi transnasional dan intervensi asing dapat memecah belah rakyat dan menjadikan negara sebagai medan perang bagi kekuatan-kekuatan luar sehingga mendorong terjadinya eskalasi konflik.

Peningkatan harga coltan mengakibatkan peningkatan kontrol militer terhadap produksi dan pemasaran coltan yang ditempuh dengan cara-cara ilegal seperti memonopoli perdagangan, mengontrol produksi tanpa izin dari pemerintah dan melakukan kerja paksa. Serangan balas membalas yang tiada hentinya juga semakin memperumit konflik. Kongo menyokong gerakan separatis Rwanda, Uganda dan Burundi yang berbasis di Kongo, demikian juga sebaliknya. Parahnya, gerakan separatis Kongo tetap berada di dalam kawasan Kongo yang sudah carut marut. Kelemahan Kongo karena kekacauan dalam negeri merupakan target yang mudah dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu pemimpin negara lain terutama negara-negara yang berbatasan langsung.

Perang yang melibatkan banyak pihak ini semakin diperparah dengan penggunaan sumber daya alam sebagai sumber pendanaan konflik. Sumber daya alam ditukar dengan senjata. Maka, terjadilah lingkaran konflik yang terus berputar. Dalam hal ini, coltan mampu memberikan basis perekonomian yang kuat bagi berjalannya perekonomian perang di Kongo. Karena itu, coltan memainkan peran yang menentukan bagi keberlangsungan dan dinamika konflik di Kongo. Coltan memang bukan akar penyebab konflik di Kongo, tetapi coltan mampu memperhebat dan menopang konflik yang berkontribusi terhadap terlokalisasinya konflik dalam sistem konflik yang lebih besar di Kongo (Moyroud & Katunga t.t.).

Kendali atas sumber-sumber alam merupakan faktor yang menentukan dalam konflik sumber daya alam yang terjadi di Kongo. Pejabat di suatu negara dapat menggunakan perpecahan di negara yang berbatasan sebagai kedok bagi kegiatan-kegiatan ilegalnya sendiri. Perdagangan dan eksploitasi ilegal melalui penggunaan militer memungkinkan sumber-sumber alam di suatu negara jatuh di tangan negara-negara pelaku intervensi. Ross (2003) menjelaskan bahwa

sumber daya alam dapat mendorong terjadinya perang dengan membantu membiayai gerakan pemberontakan melalui ekstraksi dan penjualan sumber daya alam, memperlemah negara, serta menciptakan situasi yang cenderung memperpanjang konflik dengan meningkatkan ketertarikan pihak asing untuk mendukung suatu gerakan pemberontak yang terjadi di dalam negara karena kepentingan mereka terhadap sumber daya alam tersebut.

Bagi negara-negara asing peserta Perang Kongo Kedua, intervensi dalam konflik sudah tidak lagi atas dasar kepentingan keamanan negara masing-masing. Konflik berkembang karena kepentingan-kepentingan penumpukan kekayaan pribadi para elit militer dan para pelaku perekonomian perang. Perubahan tujuan dan motif konflik ini menunjukkan adanya perluasan isu dalam konflik. Kekuatan militer Rwanda, Uganda dan Burundi yang semula bertujuan untuk melindungi etnis Tutsi mengubah tujuannya menjadi melindungi aset-aset ekonomi di Kongo dan eksploitasi sumber daya alam Kongo sebagai sumber pendanaan perang dan memperkaya diri. Sehingga terjadi hubungan yang sistematis dan intim antara aktivitas ekonomi dan militer di Kongo (Jackson 2003).

Kesimpulan

Ketika Rwanda dan Uganda menginvasi Kongo pada 1998 dengan alasan politik dan keamanan, sebenarnya keduanya telah memiliki agenda tersembunyi yaitu untuk meraih tujuan-tujuan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam Kongo yang berlimpah. Coltan, sumber daya alam yang sedang melonjak di pasaran dunia, menjadi sasaran eksploitasi utama Rwanda dan Uganda. Keadaan menjadi lebih menguntungkan karena coltan banyak terdapat di Kivu, provinsi dimana para milisi Interahamwe dan eks-FAR ditampung, yang terletak di perbatasan Rwanda-Kongo dan Uganda-Kongo serta lemah dari kontrol Pemerintah Kongo.

Ketidakstabilan dan kelemahan Pemerintah Kongo menjadi sumber keberuntungan lain bagi Rwanda dan Uganda untuk melanjutkan intervensinya di Kongo. Melalui pemanfaatan pertikaian etnis di Kongo, Rwanda dan Uganda membangun gerakan pemberontakan di dalam negeri Kongo sebagai aliansinya untuk memudahkan eksploitasi sumber daya alam Kongo.

Melonjaknya harga dan kebutuhan coltan kemudian menarik perusahaan-perusahaan multinasional untuk ikut terlibat dalam perdagangan coltan di Kongo. Namun ironisnya, perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya bukan dengan Pemerintah Kongo tetapi dengan kelompok pemerontak yang menguasai Kivu, yang secara langsung juga memberikan hasil perdagangan coltan tersebut kepada Rwanda. Demikian pula yang dilakukan oleh Uganda melalui RCD-ML dan MLC. Karena itu, perdagangan coltan secara langsung memberikan sokongan

dana bagi gerakan pemberontakan Kongo beserta negara penginvasi Kongo yang menjadi aliansinya.

Di lain pihak, Rezim Kabila sebagai pemerintah yang berkuasa di Kongo sangat mengandalkan dukungan eksternal dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kabila, yang kemudian mendapat dukungan dari Zimbabwe, Angola dan Namibia, mempertukarkan bantuan yang diterimanya dengan pemberian konsesi dan terlibat kerjasama yang hanya menguntungkan negara-negara aliansi dan kroni-kroni Kabila saja. Eksploitasi ilegal coltan mampu membangun jaringan elit yang terdiri dari angkatan bersenjata negara, pemimpin negara dan perusahaan-perusahaan multinasional. Kongo akhirnya menjadi ladang eksploitasi bagi negara lain sekaligus menjadi arena peperangan yang sebenarnya didanai dengan sumber daya alamnya sendiri. Para pemimpin politik dan militer Rwanda, Uganda, Burundi, Angola, Namibia dan Zimbabwe bahkan rezim berkuasa di Kongo menggunakan posisi dan kekuasaannya untuk mengeksploitasi Kongo (Iyenda 2005, 9).

Perang yang akhirnya diikuti oleh tujuh negara sekaligus dan melibatkan berbagai kelompok pemberontak dan milisi bersenjata serta peran dari sejumlah perusahaan multinasional menunjukkan secara jelas pengaruh keberlimpahan coltan dalam mata rantai terjadinya eskalasi Perang Kongo Kedua.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

Aust, Björn, 2005. Tentara Sewaan Perusahaan: Kepentingan Ekonomi dan Perdagangan Militer di Kongo. dalam Dario Azzellini and Boris Kanzleiter (eds.), 2005. *La Empresa Guerra: Bisnis Perang dan Kapitalisme Global*. Yogyakarta: INSIST Press.

Clark, John F. dan Mungbalemwe Koyame, 2002. The Economic Impact of the Congo War. dalam John F. Clark (ed.), 2002. *The African Stakes of the Congo War*. New York: Palgrave Macmillan.

Jurnal Online

Goerzig, Carolin, 2005. Preventing the New Wars: A Proactive Approach to the Privatisation and Commercialisation of Violence. [online]. BSIS Journal of

International Studies, **2**. dalam www.kent.ac.uk/brussels/journal/archivepage/2005/Goerzig%20-%20Preventing%20the%20New%20Wars.pdf [diakses 2 Januari 2009].

Iyenda, Guillaume, 2005. Civil Wars and Lootings in the Congo: How the Poor Pay the Bill. [online]. African Journal on Conflict Resolution, **5** (2). dalam <http://www.accord.org.za/publications/ajcr/downloads/335-ajcr-volume-5-no-2-2005> [diakses 22 Maret 2009].

Ross, Michael, 2004. How Do Natural Resources Influence Civil War: Evidence from Thirteen Cases. [online]. International Organization, **58** (1). dalam <http://www.jstor.org/stable/3877888> [diakses 17 Oktober 2008].

Artikel Online

Delawala, Imyitaz, 2001. What is Coltan. [online]. Global Policy Forum. dalam www.globalpolicy.org/component/content/article/198/40107.html [diakses 18 Oktober 2008].

Essick, Kristi, 2001. Guns, Money and Cell Phones. [online]. dalam <http://www.globalissues.org/article/442/guns-money-and-cell-phones> [diakses 14 September 2008].

Exenberger, Andreas dan Simon Hartmann, 2007. The Vicious Cycle of Exploitation from World Market Integration: Lesson from the Congo. [online]. The Dark Side of Globalization. dalam http://www.uibk.ac.at/fakultaeten/volkswirtschaft_und_statistik/forschung/wopec/repec/inn/wpaper/2007-31.pdf [diakses 11 Oktober 2008].

Gross, Deanna, 2007. Politics and Plunder: Civil War and Regional Intervention in Africa. [online]. dalam search.arrow.edu.au/main/results?subject=democratic+republic+of+congo [diakses 22 Maret 2009].

Hayes, K. dan R Burge, 2003. Coltan Mining in the Democratic Republic of Congo: How Tantalum Using Industries Can Commit to the Reconstruction of the DRC. [online]. dalam tierra.rediris.es/coltan/coltanreport.pdf [diakses 17 November 2008].

Humphreys, Macartan, 2003. Natural Resource, Conflict and Conflict Resolution. [online]. dalam www.santafe.edu/files/gems/obstaclestopace/humphreys.pdf [diakses 25 Maret 2009].

- International Crisis Group, 1998. Congo at War: A Briefing on the Internal and External Players in the Central African Conflict. [online]. dalam http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A400222_17111998.pdf [diakses 24 Maret 2009].
- _____, 1999. Africa's Seven Nation War. [online]. dalam http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A400038_21051999.pdf [diakses 24 Maret 2009].
- _____, 2000. Scramble for the Congo: Anatomy of an Ugly War. [online]. dalam http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A400130_20122000.pdf [diakses 24 Maret 2009].
- _____, 2003. The Kivus: The Forgotten Crucible of the Congo Conflict. [online]. dalam <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1630&l=1> [diakses 19 September 2008].
- International Peace Information Service Report, 2002. Supporting the War Economy in the DRC: European Companies. [online]. dalam <http://www.grandslacs.net/doc/2343.pdf> [diakses 18 Oktober 2008].
- Jackson, Stephen, 2003. Fortunes of War: The Coltan Trade in the Kivus. [online]. Overseas Development Institute. dalam www.odi.org.uk/HPG/papers/bkground_drc.pdf [diakses 15 September 2008].
- Jamboweb, 2001. Monopoly on DRC Wonder Mineral Ends. [online]. dalam www.jamboweb.com [diakses 17 November 2008].
- Lalji, Nadira, 2007. The Resource Curse Revised: Conflict and Coltan in the Congo. [online]. dalam <http://www.harvardir.org/articles/1677/> [diakses 14 September 2008].
- Montague, Dena, 2002. Stolen Goods: Coltan and Conflict in the Democratic Republic of Congo. [online]. dalam <http://www.worldpolicy.org/projects/arms/news/22.1montague.pdf> [diakses 18 Oktober 2008].
- Moyroud, Celine dan John Katunga, Coltan Exploration in Eastern Democratic Republic of the Congo (DRC). [online]. dalam www.acts.or.ke/pubs/books/docs/scarcity_chpt4.pdf [diakses 14 September 2008].
- National Council for the Social Studies, 2007. Congo: Elections and the Battle for Mineral Resource. [online]. dalam www.members.ncss.org/se/7101/71010724.pdf [diakses 15 September 2008].

- Ndikumana, Lèonce dan Kisangani Emizet, 2003. The Economic of Civil War: the Case of the Democratic Republic of Congo. [online]. dalam papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=443580 [diakses 10 Oktober 2008].
- Netherlands Institute for Southern Africa and International Peace Information Service, 2006. The State vs The People: Governance, Mining and the Transitional Regime in the Democratic Republic of Congo. [online]. dalam www.globalpolicy.org/security/issues/congo/2006/0411people.pdf [diakses 14 September 2008].
- Roskill Information Services, 2002. The Economic of Tantalum. [online]. dalam <http://www.roskill.com/reports/report.html?id=102> [diakses 17 November 2008].
- Ross, Michael, 2003. Natural Resources and Civil War: An Overview. [online]. dalam <http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/WBpaper.pdf> [diakses 30 November 2008].
- _____, 2007. Mineral Wealth, Conflict, and Equitable Development. [online]. dalam <http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/MineralEquitableDev.pdf> [diakses 30 November 2008].
- Social Development Department, 2002. The Structure of Rebel Organizations Implications for Post Conflict Reconstruction. [online]. dalam http://siteresources.worldbank.org/INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/214578-1111661180807/20486_519/CPRnotes4-Draft1-web.pdf [diakses 13 November 2008].
- Stepanicich, Dan, 2009. Armed Activities on the Territory of the Congo: Democratic Republic of the Congo vs Uganda. [online]. dalam <http://mun.berkeley.edu/Conference/ICJ1.pdf> [diakses 24 Maret 2009].
- Todd, Benjamin, 2008. Congo, Coltan, Conflict. [online]. dalam http://journal.heinz.cmu.edu/articles/congo_coltan_conflict/ [diakses 11 Oktober 2008].
- United Nations, 2001. Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo. [online]. dalam [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/5e423385c10ae294c1256b1100505218/\\$FILE/No132354.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/5e423385c10ae294c1256b1100505218/$FILE/No132354.pdf) [diakses 29 Mei 2009].

- _____, 2002. Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo. [online]. dalam http://www.afrol.com/Countries/DRC/documents/un_resources_2002_rwanda.htm [diakses 29 Mei 2009].
- United State Geological Survey, 2001. Mineral Commodity Surveys: Tantalum. [online]. dalam <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2001/mcs2001.pdf> [diakses 17 November 2008].
- United States Institute of Peace, 2007. Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution. [online]. dalam <http://www.usip.org/ed/npec/o8sg.pdf> [diakses 17 November 2008].
- US Agency for International Development, 2004. Mineral and Conflict: A Toolkit for Intervention. [online]. dalam www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Minerals_and_Conflict_2004.pdf [diakses 25 Maret 2009].